

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **1.1 Kajian Pustaka**

Pada Kajian Pustaka akan dikemukakan teori-teori, penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan landasan teori berupa premis mengenai Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan dan Dampaknya Pada Pengelolaan Keuangan UMKM.

Hal ini didasarkan pengertian Kajian Pustaka menurut Sugiyono (2016:87):

“Menurut Sugiyono (2016:87) tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali mengenai pustaka-pustaka yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian, karena dengan adanya tinjauan pustaka maka peneliti akan semakin banyak mengetahui tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, sehingga peneliti dapat memahami dan mengetahui permasalahan dalam penelitian sebelumnya.”

##### **1.1.1 Pengertian Literasi Keuangan**

Literasi keuangan adalah pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisir keuangan pribadi dan bisnis Rika Desiyanti & Hamirul (2020:2). Adapun Christian Herdinata (2020:16) menyatakan bahwa Literasi keuangan merupakan kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan hidup bisa lebih sejahtera di masa yang akan datang. Sementara itu, Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK/07/2016 menjelaskan literasi keuangan menurut OJK adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Literasi Keuangan adalah kemampuan dan pengetahuan dalam meningkatkan kualitas pengambilan

keputusan dan pengelolaan keuangan yang dimiliki agar berkembang dalam rangka mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang.

#### **2.1.1.1. Tingkat Literasi Keuangan**

Tingkat Literasi Keuangan menurut Survey OJK (2013), yaitu :

- 1) ***Well literate***  
“Yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan”.
- 2) ***Sufficient literate***  
“Memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan”.
- 3) ***Less literate***  
“Hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan”.
- 4) ***Not literate***  
“Tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan”.

#### **2.1.1.2. Indikator Literasi Keuangan**

Indikator literasi keuangan menurut Hidajat (2016) terdapat 4 (empat), diantaranya adalah pengetahuan umum tentang keuangan, investasi, Tabungan dan pinjaman, Asuransi. Berikut penjelasannya :

- 1) **Pengetahuan umum tentang keuangan**  
“Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, opportunity cost, nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain.”

**2) Investasi**

“Investasi adalah menyimpan atau menempatkan uang agar bisa bekerja sehingga dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Cara yang sering digunakan seseorang dalam berinvestasi yakni 16 dengan meletakkan uang ke dalam surat berharga termasuk saham, obligasi dan reksa dana atau dengan memiliki real estate.”

**3) Tabungan dan pinjaman**

“Tabungan dan pinjaman (saving and borrowing) merupakan produk perbankan yang lebih dikenal sebagai tabungan dan kredit. Tabungan (saving) merupakan sejumlah uang yang disimpan untuk kebutuhan di masa depan. Seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya akan cenderung menyimpan sisa uangnya tersebut. Bentuk simpanan bisa berupa tabungan dalam bank atau tabungan dalam bentuk deposito. Sedangkan pinjaman (borrowing) merupakan suatu fasilitas untuk melakukan peminjaman uang dan membayarnya kembali dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

**4) Asuransi**

“Asuransi merupakan suatu bentuk perlindungan secara finansial yang bisa dilakukan dalam bentuk asuransi jiwa, asuransi properti, asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan. Tujuan dari asuransi adalah untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi hal yang tidak terduga seperti kematian, kehilangan, kecelakaan, atau kerusakan. Asuransi melibatkan pihak tertanggung untuk melakukan pembayaran premi secara berkala dalam suatu waktu tertentu yang berguna sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan yang diperoleh dari pihak tertanggung.”

Senada dengan pernyataan diatas, menurut Latifiana (2017) indikator literasi keuangan diantaranya yaitu :

- 1) Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan,
- 2) Pengelolaan Kredit,
- 3) Pengelolaan Tabungan,
- 4) Investasi.

Sedangkan menurut Raihan Chen & Volpe (2006) membagi empat aspek literasi keuangan yaitu :

- 1) pengetahuan keuangan dasar (basic financial knowledge),

- 2) simpanan dan kredit (saving and borrowing),
- 3) investasi (investment),
- 4) asuransi.

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, maka indikator Literasi Keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengetahuan dasar pengelolaan keuangan, Investasi, Pengelolaan Tabungan dan Pinjaman, serta Asuransi.

### **1.1.2 Pengertian Inklusi Keuangan**

Inklusi Keuangan adalah seluruh usaha yang bertujuan untuk menghilangkan seluruh hambatan guna memanfaatkan konsep berbiaya rendah untuk memanfaatkan semua hambatan yang ada terhadap akses masyarakat terhadap jasa keuangan Kusumaningtuti & Setiawan (2018:18). Sementara itu, Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 76/POJK/07/2016 menjelaskan Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pernyataan yang diungkapkan Halim Alamsyah (2015:11), menyatakan bahwa *Financial inclusion* (keuangan inklusif) didefinisikan sebagai upaya mengurangi segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Inklusi Keuangan adalah seluruh usaha yang bertujuan untuk mengurangi segala bentuk hambatan terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 1) Indikator Inklusi Keuangan

Menurut Kusumaningtuti dan Setiawan (2018:108), indikator inklusi keuangan adalah Akses (*access*), Penggunaan (*usage*), dan Kualitas (*quality*).

Berikut Penjelasannya :

### 1) Akses (*access*)

“Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal.”

### 2) Penggunaan (*usage*)

“Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

### 3) Kualitas (*quality*)

“Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.”

Serupa dengan pernyataan diatas, (Perbankan Indonesia, 2014) dalam Booklet Keuangan Inklusif memaparkan bahwa, untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Dari beberapa referensi, Indikator yang dapat dijadikan ukuran sebuah negara dalam mengembangkan keuangan inklusif yaitu :

- 1) Ketersediaan / akses,
- 2) Penggunaan, Kualitas dan
- 3) Kesejahteraan.

Senada pula dengan kedua pernyataan diatas, Dalam SNLKI (2017:21) Unsur yang berperan dalam inklusi keuangan yaitu : akses, ketersediaan produk dan layanan jasa, penggunaan, serta kualitas. Berikut Penjelasannya :

**1) Akses**

“Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal.”

**2) Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan**

“Ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh seluruh golongan masyarakat agar setiap golongan tersebut mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam hal ini lembaga jasa keuangan perlu menyediakan produk dan layanan jasa keuangan untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, ketersediaan produk dan layanan jasa keuangan perlu disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau baik dari segi harga maupun aksesnya.”

**3) Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan**

“Penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat merupakan tujuan akhir dari inklusi keuangan sehingga diharapkan masyarakat bukan hanya menikmati produk dan layanan jasa keuangan yang digunakannya, melainkan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

**4) Kualitas**

“Kualitas merupakan kondisi dimana produk dan layanan jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat yang menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Kualitas dalam hal ini, dapat diartikan pula penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat secara aktif yang berarti produk dan layanan jasa keuangan “fit” dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga frekuensi penggunaannya relatif tinggi.”

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator Inklusi Keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Akses, Penggunaan, serta Kualitas.

### **1.1.3 Pengertian Pengelolaan Keuangan UMKM**

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha Purba dkk., (2021:114). Sementara itu,

Menurut Anwar (2019:5) menjelaskan manajemen keuangan adalah Suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Sedangkan pernyataan yang diungkapkan Kasmir (2016:5) menyatakan bahwa Manajemen Keuangan (pengelolaan Keuangan) adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaa, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengelolaan Keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan dengan beberapa tujuan menyeluruh.

### **1) Indikator Pengelolaan Keuangan**

Menurut (Anugrah, 2018:27), Adapun Indikator Pengelolaan Keuangan yaitu :

#### **1) *Consumption***

“Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas barang atau jasa. Konsumsi seseorang menentukan baik atau buruknya pengelolaan keuangan seseorang. Hal ini dilihat dari apa yang dia beli dan mengapa ia membelinya.”

#### **2) *Cash-flow management***

“Pengelolaan uang kas yang baik dilihat dari keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Selain itu cash flow management dapat dilihat dari pembayaran tagihan yang tepat waktu, menanggarkan pengeluaran dan perencanaan masa depan.”

#### **3) *Saving and investment***

“Tabungan merupakan penerimaan yang disimpan untuk dipergunakan dilain waktu dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan investasi merupakan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan maanfaat dimasa yang akan dating.”

4) *Credit management*

“Manajemen utang pengelolaan utang yang sesuai dengan kapasitas sehingga tidak menjadi beban dan diharapkan meningkatkan kesejahteraan.”

Serupa dengan pernyataan Anugrah, Indikator Pengelolaan Keuangan Menurut Kasmir (2016) yaitu :

- 1) Meramalkan dan merencanakan keuangan,
- 2) Keputusan permodalan,
- 3) investasi, dan pertumbuhan,
- 4) Melakukan pengendalian,
- 5) Hubungan dengan pasar modal.

Adapun menurut Arief Sugiono (2009) mengemukakan bahwa pengelolaan keuangan UKM terdiri dari :

- 1) Perolehan Dana,
- 2) Penggunaan Dana,
- 3) Pengelolaan Aset,
- 4) Penganggaran.

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator Pengelolaan Keuangan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Perolehan Dana, Penggunaan Dana, Pengelolaan Aset, dan Penganggaran.

#### **1.1.4 Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Christian Herdinata (2020:14) menyatakan bahwa UMKM adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan



dan pendapatan tertentu. Sedangkan Menurut Rudjito dalam N. Rianty & Sianipar (2021:12) menyatakan bahwa UMKM adalah Usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Adapun menurut Hadini, Sukei, & Kanty (2019:19) menyatakan bahwa UMKM adalah Suatu saha kecil masyarakat yang pendiriannya nerdasarkan inisiatif seseorang.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa UMKM adalah Suatu saha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu meningkatkan perekonomian bangsa.

#### **1) Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Menurut Suhartini (2015), kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Suhartini (2015) sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

## **1.2 Kerangka Pemikiran**

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam kegiatan usaha agar terciptanya keuangan yang sehat untuk mencapai kesejahteraan keuang. Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis Usaha Mikro, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar. Permasalahan tentang pengelolaan keuangan diyakini sebagai faktor kunci yang memicu kegagalan UMKM. Seharusnya pengelolaan keuangan UMKM menerapkan metode praktis dan terstruktur dalam pengelolaan keuangan dengan mempraktikkan akuntansi dengan benar. Permasalahan ini timbul dikarenakan kurangnya literasi keuangan dan Inklusi Keuangan.

Dalam kerangka penelitian ini dijelaskan dampak Pengelolaan Keuangan UMKM, menggunakan variabel seperti Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

### 1.2.1 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan

Memiliki tingkat literasi keuangan yang baik (*well literate*), maka memudahkan dalam menerapkan informasi, termasuk berbagai fasilitas, fungsi, dampak kerugian, serta hak dan kewajiban untuk mengakses dan memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan. Hal ini akan meningkatkan inklusi keuangan dengan mendorong kesadaran dan pemanfaatan produk dan layanan keuangan.

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Yuni Shara, dkk (2021:99) yang menyatakan hubungan antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan bahwa edukasi terhadap pelaku UMKM sangatlah penting guna meningkatkan literasi keuangan sehingga para pelaku UMKM mendapatkan ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan. Pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (2017:39) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, maka semakin besar peluang orang tersebut untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan, yang sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat. Demikian pula dengan pernyataan oleh Adhitya dkk, (2018:22) bahwa tingkat literasi sejalan dengan inklusi keuangan dimana literasi akan menjadi stimulus munculnya berbagai inovasi dalam menghasilkan jasa keuangan seiring perkembangan teknologi informasi.

Pernyataan atau konsep teori diatas didukung oleh penelitian – penelitian sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020) menunjukkan bahwa variable Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan disebabkan karena tingkat literasi keuangan masyarakat yang termasuk dalam kategori *higher financial literacy* dan juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya pengetahuan dan

keterampilan keuangan baik di masa sekarang maupun masa depan, sehingga bisa menggunakan produk dan layanan keuangan dengan bijak serta dapat mengambil keputusan dengan tepat. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusuma, I. N. P. (2020) menunjukkan bahwa variable Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan keuangan, semakin baik perilaku keuangan serta sikap keuangan seseorang akan meningkatkan penggunaan, pemanfaatan serta pemahaman produk dan layanan jasa keuangan. Sedangkan hasil penelitian Pulungan & Ndruru (2019) menunjukkan bahwa variable Literasi Keunagan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan pada mahasiswa UMSU, artinya semakin baik tingkat literasi keuangan mahasiswa maka inklusi keuangan semakin meningkat dalam perkembangannya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Berdasarkan premis – premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah adanya pengaruh Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan.

### **1.2.2 Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM**

Indonesia harus mampu menyediakan akses terhadap layanan keuangan yang berkualitas dan cocok bagi semua orang yang dapat menggunakannya dan memastikan bahwa masyarakat memiliki alat yang dibutuhkan untuk mengelola kondisi keuangan dan kehidupannya. Inklusi keuangan dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap proses bisnisnya. Salah satu faktor pendukung suatu bisnis adalah permodalan. Inklusi keuangan yang baik

membuat pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan pengelolaan keuangan.

Sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh Soetiono & Setiawan (2018:22) menyatakan bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan, dimana bagi pengusaha kecil, terbukanya akses permodalan ke sektor keuangan formal secara otomatis akan membuka peluang usaha ataupun meningkatkan kapasitas usahanya. Pernyataan Yukarista (2019:50) menyebutkan bahwa semakin tingginya tingkat inklusi keuangan UMKM akan memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangannya penggunaan produk dan layanan keuangan menopang perkembangan sektor keuangan dan lebih luas lagi mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendukung bahwa inklusi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Menurut Roberto & Jaka (2018:48) Tingkat inklusi keuangan yang tinggi mengandung makna semakin banyak penduduk yang memiliki akses dan terlibat dalam penggunaan produk dan layanan keuangan. Sebaliknya, indeks inklusi keuangan yang rendah dimaknai sebagai terbatasnya akses penduduk terhadap beragam produk dan layanan keuangan. Keterbatasan ini akan menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk berbagai transaksi, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dkk., (2021) menunjukkan bahwa variable Inklusi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Yang artinya jika inklusi keuangan meningkat maka kinerja keuangan akan meningkat begitupun sebaliknya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yanti (2019) menunjukkan bahwa variable Inklusi

keuangan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM akan meningkat secara signifikan apabila pelaku UMKM terus meningkatkan inklusi keuangan.

Sedangkan hasil penelitian Nurhayati, H., & Nurodin, I. (2019) menunjukkan bahwa variabel inklusi keuangan memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan. Pengaruh positif tersebut dikarenakan rumah tangga tidak hanya sekedar memiliki pengetahuan dan pemahaman keuangan namun juga melibatkan keterampilan dan kompetensi keuangan mengelola keuangan pribadi. Pada skala yang lebih besar, penggunaan fasilitas lembaga keuangan bank dan non bank dapat membantu keberhasilan rumah tangga untuk bersaing dalam ekonomi global sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi rumah tangga yang masih tergolong unbanked.

Berdasarkan premis – premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis ketiga (H3) penelitian ini adalah adanya pengaruh Inklusi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.

### **1.2.3 Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM**

Berkembangnya pengetahuan mengenai dunia keuangan menjadi salah satu alasan penting harus diiringi dengan peningkatan literasi keuangan. Semakin tinggi pengetahuan keuangan yang dimiliki seseorang akan semakin bijaksana dalam mengelola keuangannya. Dengan memiliki pengetahuan keuangan, UMKM tidak hanya mahir dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga dapat membantu UMKM.

Konsep yang menghubungkan antara Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM oleh Christian Herdinata (2020:16) menyatakan bahwa dengan menguasai literasi keuangan, UMKM akan mampu mencapai keberlanjutan bisnisnya terutama dalam aspek pengelolaan keuangannya sehingga mereka akan mampu melihat dari kemampuan pengembalian modal awal yang digunakan untuk membangun bisnis. Konsep penghubung literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan menurut Hamirul & Rika (2020:25) yang menyatakan bahwa, sangat penting memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik menjadi usaha yang lebih besar. Demikian Pula pernyataan dari PDPM ITS (2020:31) yang menyatakan bahwa, UMKM memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk memahami pengelolaan keuangan dalam hal kemampuan keberlangsungan usaha dan untuk keunggulan bersaing, untuk itu diperlukan pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan keuangan bagi UMKM.

Konsep – konsep penghubung diatas telah dibuktikan dengan penelitian – penelitian sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widya Eka Putri (2020) menunjukkan bahwa variable literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan yang artinya semakin baik tingkat literasi keuangan pelaku UMKM maka semakin baik juga pengelolaan keuangan yang dilakukan begitu juga sebaliknya. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Saskia, D. H., & Yulhendri, Y. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan keuangan pelaku UMKM binaan Rumah Kreatif BUMN Padang

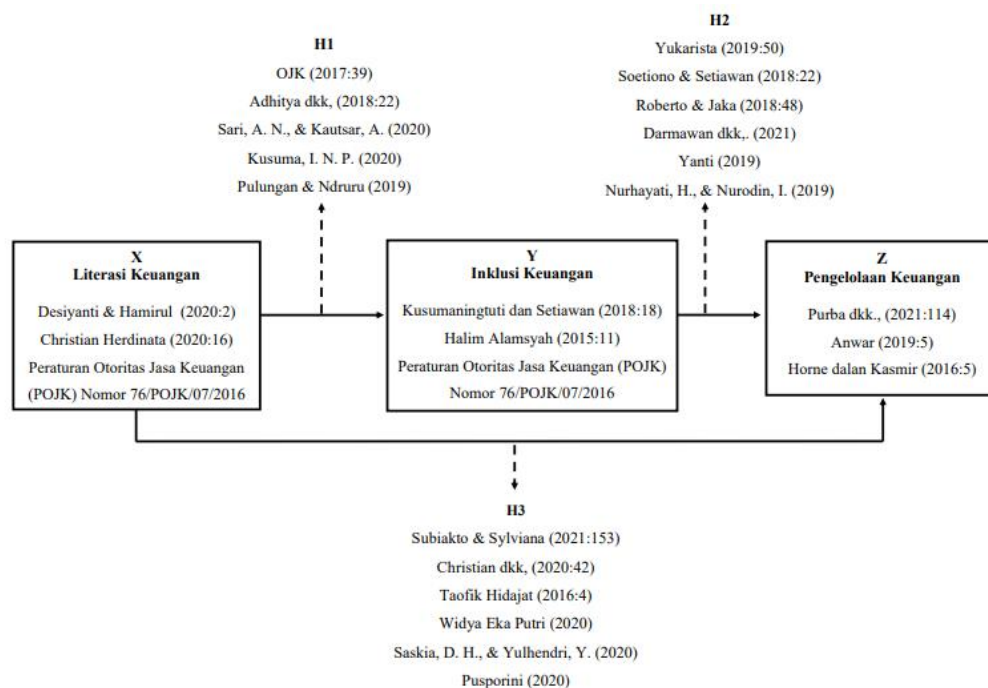
berpengaruh signifikan dengan pengelolaan keuangan pelaku UMKM RKB Padang. Artinya jika pengetahuan tinggi, pelaku UMKM akan dapat memanfaatkan pengetahuannya tersebut untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Sedangkan hasil penelitian Pusporini (2020) menunjukkan bahwa variable Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Cinere Depok. Pelaku UMKM Memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi dan Pelaku UMKM Memiliki kemampuan untuk menggunakan agency untuk memperbaiki keuangan. Dalam hal ini untuk meningkatkan literasi keuangan dengan memberikan manfaat kepada masyarakat luas seperti kemampuan untuk memilih produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan membuat perencanaan keuangan yang baik, dan terhindar dari investasi yang tidak jelas.

Berdasarkan premis – premis diatas, dapat dirumuskan bahwa hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah adanya pengaruh Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM.



### 1.2.4 Paradigma Penelitian

Dari kerangka pemikiran dapat digambarkan model penelitiannya sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Paradigma Penelitian**

### 1.3 Hipotesis

Berdasarkan pemikiran diatas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan.

H2 : Inklusi Keuangan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM.

H3 : Literasi Keuangan berpengaruh terhadap Pelaporan Keuangan UMKM.